



DOKUMEN

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
Jln. Agus Salim. Painan Telp.(0756) 21504-21032
Fax. 21032

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Bupati Pesisir Selatan dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan bagi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan untuk meningkatkan kinerja tahun-tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah laporan kinerja tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 4 (empat) indikator kinerja utama, yaitu :

Tabel I
Rincian Ikhtisar Eksekutif

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Hasil penilaian AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi oleh Inspektorat	A (88,31%)	A (88,39%)	100,09%
2.	Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	41,10	41,10	100%
3.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan (ADHK)	2.30 %	(0,39%)*	(74,6%)
		Laju Pertumbuhan sektor Industri (ADHK)	1.0%	(3,08%)*	(256,4%)



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena rahmat dan hidayahNya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Laporan ini menyajikan kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang mencakup Akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan Tujuan dan Sasaran strategis Tahun 2021-2026.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan disusun berdasarkan pada PP No.29/2014 Tentang SAKIP, Penyusunan LKjIP 2021 merupakan komitmen terhadap aspek Transparansi dan Akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang bertujuan memberikan Informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan Bagi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Painan, 28 Januari 2022

**Kepala Dinas
Perdagangan dan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan**



MIMI RIARTY ZAINUL, SE.Ak, M.Si
NIP. 19790529 200212 2 002



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Gambaran Umum Dinas	3
1.4.1 Struktur Organisasi	4
1.4.2 Kepegawaian dan Tupoksi Eselon II dan III	6
1.4.3 Sarana dan Prasarana Penunjang	15
1.5 Sistematika Penyajian	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	21
2.1.1 Tabel Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	23
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	25
2.3 Indikator Kinerja Utama	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	28
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	29
3.3 Capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	30
3.4 Realisasi Anggaran	69
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan	71
4.2 Saran	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data PNS Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2021 Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.2	Data Pegawai Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 1.3	Data PNS Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan jenis kelamin	7
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021	15
Tabel 2.1	Hubungan Hierarkis Misi Tujuan dan Sasaran	24
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	26
Tabel 2.3	Indikator kinerja utama dan target capaian tahun 2021 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Pesisir Selatan	27
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021.	29
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021	29
Tabel 3.3	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1 Tahun 2021	31
Tabel 3.4	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	31
Tabel 3.5	Realisasi Kualifikasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2020-2021.	33
Tabel 3.6	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP OPD	33
Tabel 3.7	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 Tahun 2021	34
Tabel 3.8	Hasil Evaluasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut Tahun 2021	35
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja dan Target Akhir Renstra	37
Tabel 3.10	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	37
Tabel 3.11	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Sektor Perdagangan tahun 2021	38



Tabel 3.12	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Barang Pokok dan Penting Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021	39
Tabel 3.13	Realisasi dan Capaian indikator kinerja Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan Barang penting lainnya antar waktu	40
Tabel 3.14	Data Pasar di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021	45
Tabel 3.15	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 Sektor Perindustrian Tahun 2021	46
Tabel 3.16	Tabel Pertumbuhan Industri Tahun 2016-2021	47
Tabel 3.17	Rekapitulasi Data Industri Kecil dan menengah	47
Tabel 3.18	Rekapitulasi Data Industri Berdasarkan Klasifikasi Industri	48
Tabel 3.19	Rekapitulasi Jumlah IKM yang difasilitasi Sertifikasi, Standarisasi Produk IKM serta Izin Usaha Industri Tahun 2020-2021	49
Tabel 3.20	Rekapitulasi Sertifikasi, Standarisasi, Standarisasi Produk IKM dan Izin Usaha Industri yang terbit tahun 2020-2021	50
Tabel 3.21	Pelatihan IKM Tahun 2021	51
Tabel 3.22	Merek dagang Produk IKM yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkumham Tahun 2021	65
Tabel 3.23	Sertifikasi Halal produk IKM Tahun 2021	67
Tabel 3.24	Izin Edar MD-BPOM yang difasilitasi Tahun 2021	68
Tabel 3.25	Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan yang menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pesisir Selatan	5
Gambar 3.1	Jala Desa Strategis Simpang Polsek Silaut-Sungai Pulai	36
Gambar 3.2	Pasar Rakyat Painan	43
Gambar 3.3	Pasar Rakyat Kambang	43
Gambar 3.4	Pasar Rakyat Batang Kapas	44
Gambar 3.5	Pasar Rakyat Tapan	45
Gambar 3.6	Dokumentasi Pelatihan Teknologi Tepat Guna Bagi IKM Logam	64
Gambar 3.7	Pembangunan Sentra IKM Tahap III	69



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.



1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran tahun 2021. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2021 sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2021.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 disusun mengacu kepada peraturan perundangundangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi



Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

1.4 GAMBARAN UMUM DINAS

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 138 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, adalah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai kebutuhan, kemampuan Daerah dalam sektor Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan potensi Daerah yang dimiliki.

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- c. pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang



pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

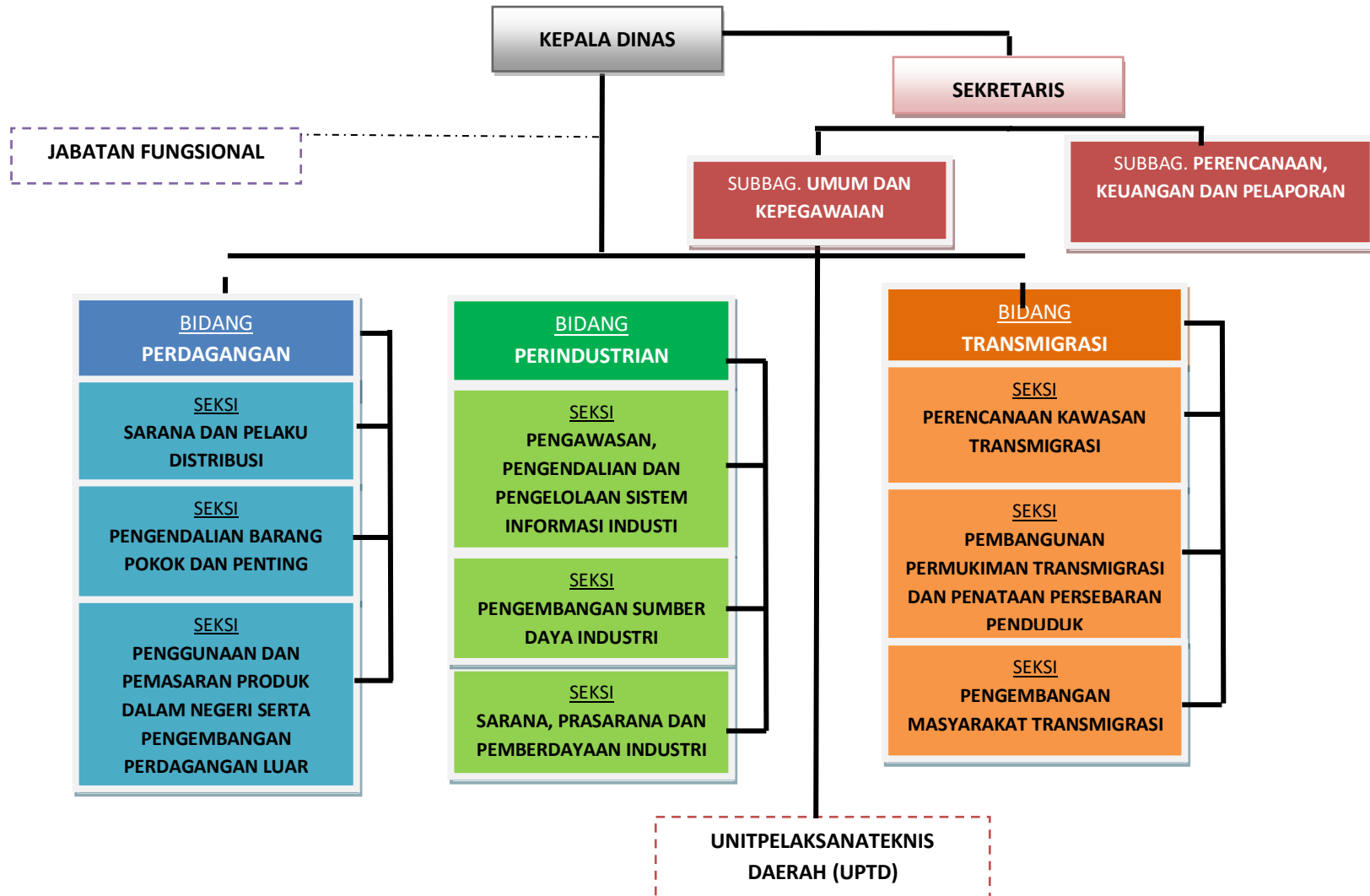
1.4.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 138 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESIR SELATAN





1.4.2 Kepegawaian dan Tupoksi Eselon II dan Eselon III

Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi didukung oleh 37 (Tiga puluh tujuh) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai mana dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Data PNS Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan Golongan

Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Jumlah
9	26	3	-	38

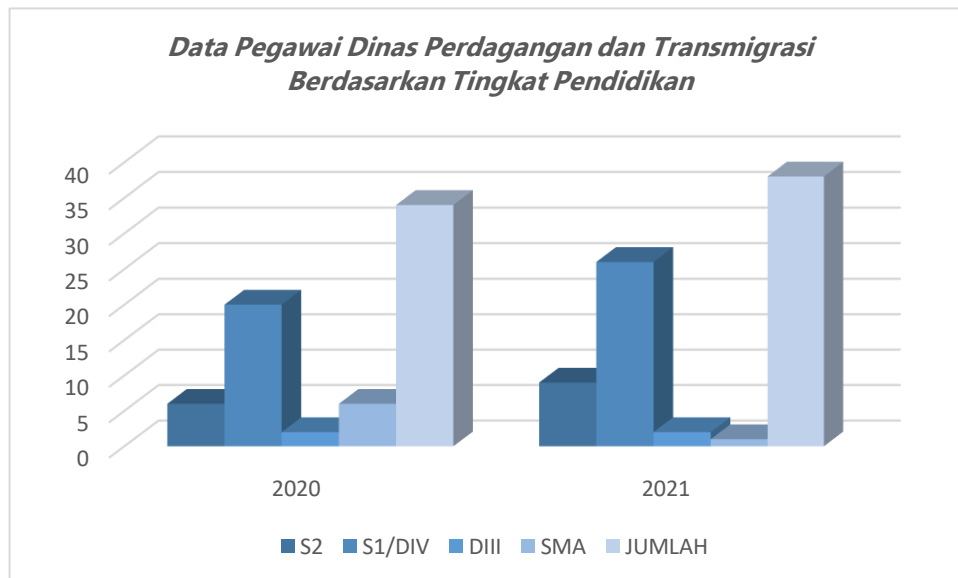
Sumber: DP-Trans 2021

Tabel 1.2

Data Pegawai Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Uraian	S2	S1/DIV	DIII	SMA	JUMLAH
2020	6	20	2	6	34
2021	9	26	2	1	38

Sumber: DP-Trans 2021

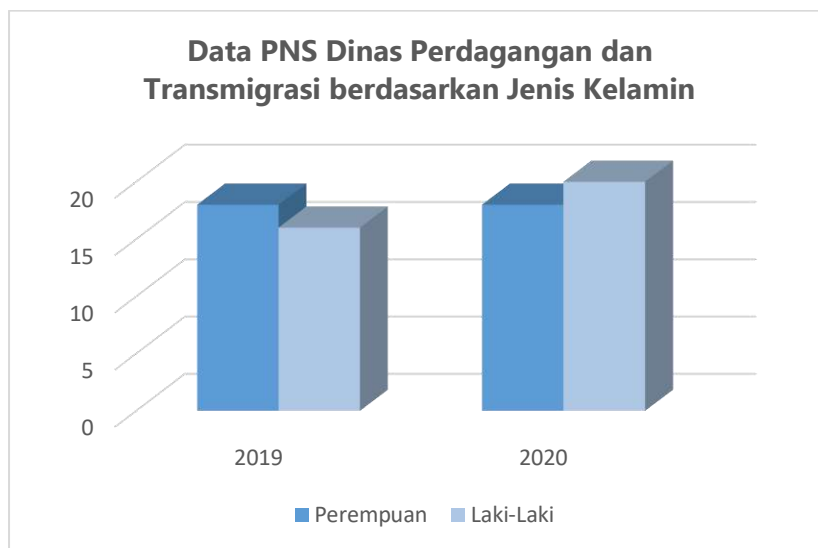




Tabel 1.3

Data PNS Dinas Perdagangan dan Transmigrasi berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Jumlah Pegawai	Perempuan	Laki-Laki
2020	34	18	16
2021	38	18	20



Tupoksi

Pada tahun 2021, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh 1 (Satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 9(Sembilan) orang Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 1(satu) orang Kepala UPT dan 1 (satu) orang kepala sub bagian kepegawaian pada UPT.

Adapun Tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dijabarkan melalui tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan bidang-bidang sebagai berikut :



A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

1. Tugas Pokok Kepala Dinas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah.

2. Fungsi Kepala Dinas

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- c. Pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- e. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pembinaan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- f. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- i. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- k. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- l. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan



bidang tugasnya;

- m. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- n. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- o. Merumuskan kebijakan daerah dibidang pengembangan perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;
- p. Melaksanakan bimbingan teknis dan survevisi atas pelaksanaan di bidang perdagangan dan perindustrian;
- q. Mengawasi, mengendalikan dan memantau pelaksanaan kegiatan dinas;
- r. Melaksanakan Administrasi Dinas
- s. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- t. Menjalin kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- u. Mengkoordinir dan mengawasi Unit Pelaksana Teknis lingkup dinas;
- v. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua) Kepala Sub bagian yaitu :

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

1. Tugas Pokok Sekretaris

Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan keuangan, perencanaan program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan dilingkungan Dinas.



ungsi Sekretaris

- a. Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, organisasi, kepegawaian, tata laksana, tata persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan rumah tangga, anggaran dan barang milik daerah kegiatan Dinas;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan urusan penganggaran, administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji Dinas;
- c. Koordinasi dan penyusunan rencana program serta evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perdagangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi
2. Kepala Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting
3. Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri serta Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

1. Tugas Pokok Kepala Bidang Perdagangan

Melakukan pengumpulan data, melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dan pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor serta bina pelaku ekspor impor.

2. Fungsi Kepala Bidang Perdagangan

- a. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;



- c. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- d. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- f. memantau dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- g. koordinasi sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/kota;
- h. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/kota;
- i. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/kota;
- j. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- k. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- l. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- m. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- n. koordinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida kabupaten/kota (KP3 Kabupaten/Kota), produsen, distributor, dan pengecer ditingkat daerah kabupaten/kota;



- o. penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- p. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- q. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- r. penerbitan Surat Keterangan Asal;
- s. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perindustrian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Perindustrian dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :

- a. Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri
- b. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri
- c. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri

1. Tugas Pokok Kepala Bidang Perindustrian

Merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembangunan dalam bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri, Pengembangan Sumber Daya Industri, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri.

2. Fungsi Kepala Bidang Perindustrian

- a. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;



- b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah dibidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Kabupaten;
- g. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- h. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Kabupaten;
- i. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- j. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Transmigrasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Transmigrasi dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :

- 1. Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- 2. Kepala Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penataan



Persebaran Penduduk

3. Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

1. Tugas Pokok Kepala Bidang Transmigrasi

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

2. Fungsi Kepala Bidang Transmigrasi

- a. Menumbuhkembangkan produksi pengolahan dan pemasaran serta kewirausahaan masyarakat transmigrasi;
- b. menyiapkan konsep pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual dan bantuan pangan kepada masyarakat transmigrasi;
- c. menyiapkan lembaga ekonomi dan permodalan, promosi dan publikasi dan kerja sama kemitraan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

F. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Kemetrologian

Tugas dan Fungsi UPTD Kemetrologian ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri, yaitu Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kemetrologian dan Standarisasi Pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi.

1.4.3 Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sarana dan prasarana penunjang sebagai berikut:



Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021

No. Urut.	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
1	2	3
1	TANAH	20
	TANAH	20
	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG	20
	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	15
	Tanah Bangunan Pasar	15
	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/ Jasa	5
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5
2	PERALATAN DAN MESIN	339
	ALAT ALAT ANGKUTAN	14
	Alat Angkutan Darat Bermotor	14
	Kendaraan Bermotor Penumpang	2
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	2
	Kendaraan Bermotor Khusus	2
	Mobil Dapur Lapangan	2
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10
	Sepeda Motor	10
	Alat Angkutan Darat tak Bermotor	0
	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0
	Becak	0
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	6
	Alat Bengkel Bermesin	3
	Perkakas Bengkel Service	3
	Alat Bengkel (Workshop)	3
	Alat Bengkel Tak Bermesin	2
	Perkakas Bengkel Kerja	2
	Bor	2
	ALAT UKUR	1
	Alat Timbangan/Blora	1
	Timbangan Tera Ulang	1
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	313
	ALAT KANTOR	36
	Mesin Tik	2



1	2	3
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2
	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	0
	Mesin Ketik Manual Longewagen (18.)	0
	ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR	19
	Filling Besi/Metal	8
	Lemari Penyimpanan	7
	Peti Uang	1
	Lemari Kaca	3
	ALAT KANTOR LAINNYA	15
	Papan Nama Instansi	1
	Trolley Barang	2
	Mesin Absensi	1
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4
	Meja Biro	2
	Generator Set	1
	Stabilizer	0
	Papan Informasi	4
	ALAT RUMAH TANGGA	180
	Meubilair	130
	Lemari Kayu	19
	Rak Kayu	17
	Meja Kayu/Rotan	9
	Meja Rapat	10
	Meja Resepsion	3
	Kursi Tamu	3
	Kursi Putar	13
	Kursi Lipat	16
	Meja 1/2 Biro	8
	Sofa	2
	Kursi Kerja Staf	25
	Kulkas	3
	Kursi Tunggu	2
	Alat Pendingin	22
	AC Unit	16
	AC Split	3
	Kipas Angin	3
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28
	Televisi	7



1	2	3
	Baliho	1
	Wireless	1
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	0
	Stabilisator	7
	Camera Video	1
	Tangga Alumunium	1
	Handy Cam	1
	Gorden	2
	Asbak	3
	Pompa Air (Alat Rumah Tangga)	1
	Lemari Es	1
	Rak Bambu	2
	KOMPUTER	47
	Komputer Unit/Jaringan	0
	Komputer	0
	Personal Komputer	14
	P.C. Unit	1
	Lap Top	12
	Note Book	1
	Peralatan Mini Komputer	19
	Printer	2
	Computer Compatible	10
	Hard Disk Eksternal	7
	Peralatan Personal Komputer	13
	Printer	13
	Peralatan Jaringan	1
	Modem	1
	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	50
	Meja Kerja Pejabat	24
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	13
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8
	Kursi Kerja Pejabat	26
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	8
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12
	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	3
	ALAT STUDIO	1



1	2	3
	Peralatan Studio Visual	1
	Proyektor + Attachment	1
	Camera Digital	0
	ALAT KOMUNIKASI	2
	Alat Komunikasi Telephone	2
	Faximile	2
	ALAT LABORATORIUM	3
	UNIT UNIT LABORATORIUM	2
	Alat Laboratorium Kimia Air	2
	Timbangan Elektronik	2
	ALAT LABOR BENGKEL/MESIN	1
	Alat Labor Mesin	1
	Kotak/Kunci Set Besar	1
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	166
	BANGUNAN GEDUNG	166
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	146
	Bangunan Gedung Kantor	4
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1
	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	1
	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	130
	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	109
	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Darurat	3
	Toilet/WC Umum Pasar	3
	Bangunan Los Pertokoan/Pasar	13
	Bangunan Pelataran Pertokoan/Pasar	2
	Bangunan Ged. Tempat Kerja Lainnya	11
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	11
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1
	Rumah Dinas Golongan II	1
	Rumah Negara Golongan II Type C permanen	1
	BANGUNAN LAINNYA	19
	Bangunan MCK	2
	Bangunan Pos Jaga	1
	Halaman/Pelataran Parkir	2
	Bangunan Los Pasar	12
	Pelataran Pasar	2



1	2	3
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	16
	JALAN DAN JEMBATAN	2
	JALAN	2
	Jalan Khusus	2
	JalanKhusus	1
	Jalan Khusus Komplek	1
	BANGUNAN AIR/ IRIGASI	12
	BANGUNAN AIR KOTOR	12
	BANGUNAN AIR KOTOR	12
	Saluran Pengumpul Air Kotor	12
	INSTALASI	2
	INSTALASI LAINNYA	2
	Instalasi Lampu	1
	Instalasi Jaringan Elektronik	1
5	ASET TETAP LAINNYA	75
	BUKU PERPUSTAKAAN	75
	BUKU	70
	Umum	25
	Buku Peraturan Perundang-undangan	25
	Ilmu Pengetahuan Praktis	45
	Ilmu Perdagangan Khusus Industri	5
	Lain-lain.	40
	TERBITAN BERKALA	5
	Terbitan Berkala	5
	Lain-lain	5
6	KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan	15
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	15
	KONSTRUK	15
	KONSTRUKSI1	15
	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	15
7	ASET LAINNYA	0
	ASET LAIN-LAIN	0
	ASET TAK BERWUJUD	0
TOTAL		631



1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 menjelaskan pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021. Metode evaluasi yang digunakan adalah metode sederhana dengan membandingkan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja. Analisa terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis adalah dengan mengurai penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud. Sedangkan analisis program/kegiatan menguraikan tentang efesiensi penggunaan anggaran yang tersedia dan menguraikan keterkaitan antara program dengan indikator kinerja dan target kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1. Bab I : Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas tentang Gambaran Umum Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Kepegawaian dan Tupoksi Eselon II dan Eselon III, Sarana dan Prasarana Penunjang, Penentuan Isu-Isu Strategis, dan sistematika penyajian.
- 2. Bab II : Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.
- 3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan:
 - a. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah
Pada subbab ini disajikan hasil pengukuran kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, evaluasi dan analisi capaian kinerja dimaksud



b. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pemerintah daerah.

4. **Bab IV : Penutup**, berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2026

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan yang secara garis besar memuat tujuan, sasaran Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten pesisir Selatan yang mengacu kepada Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Adapun Visi, misi, yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah :“ **Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermatabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional**”.

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

- Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju : : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan

ke depan.

Bermatabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)..

Akuntabel Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermatabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional ” dilaksanakan melalui 6 (enam) misi. Berdasarkan 6 (enam) misi terdapat 3 (tiga) misi yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yakni :

- Misi ke 1 : **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**
- Misi ke 2 : **Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat**
- Misi ke 3 : **Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah**

2.1.1 Tabel Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Berdasarkan misi ke 1 (satu), misi ke 2 (dua) dan Ke 3 (tiga) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai oleh Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada tabel 2.2.1.

Tabel 2.1
Hubungan Hierarkis Misi Tujuan dan Sasaran

MISI 1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Meningkatkan kualitas layanan internal Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Peningkatan fasilitas layanan umum Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
			Peningkatan Kualitas SDM Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
			Peningkatan kualitas dokumen pelayanan publik Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
			Peningkatan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dan aset
		Meningkatkan kualitas perencanaan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Peningkatan kualitas pelaksanaan Prog dan Keg Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
			Peningkatan realisasi keuangan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
MISI 2	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat		
Meningkatnya ekonomi masyarakat di Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi	Tersedianya lahan kawasan transmigrasi yg memenuhi kriteria	Penyediaan Tanah pembangunan kawasan transmigrasi
			Penataan pemukiman kawasan transmigrasi
			Pemindahan dan penempatan masyarakat transmigrasi
		Terlaksananya pengembangan kawasan	Peningkatan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur penunjang sosial dan ekonomi masyarakat

		transmigrasi	kawasan transmigrasi
			Peningkatan kapasitas SDM masyarakat transmigrasi
MISI 3	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah		
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatkan Omset Perdagangan	Peningkatan pangsa pasar produk/komoditi
			Meningkatkan Standarisasi Alat Ukur dan Perlindungan Konsumen
			Meningkatkan Legalitas Usaha Perdagangan
		Terwujudnya stabilitas ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar	Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting
			Peningkatan pengawasan terhadap distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi
		Meningkatkan Omset Industri	Tercapainya Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten sesuai dengan RPIK
			Melalui : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Industri, meningkatkan sarana prasarana industri pengolahan, meningkatkan pemberdayaan industri pengolahan dan peran serta masyarakat
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Industri
			Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Legalitas Industri

Sumber: Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan TA 2021.

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESIR SELATAN

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	1	Hasil penilaian AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi oleh Inspektorat	A
2	Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi	2	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	41.1%
3	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian dan Perdagangan	3	Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan	2.3%
		4	Laju Pertumbuhan sektor Industri/ Pengolahan	1%

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan Rencana Strategis Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi Kepala Daerah yang disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Tahun 2021

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Hasil penilaian AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi oleh Inspektorat	A	Penilaian Inspektorat	Sekretariat Dinas
2.	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi (Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan, Jejaring Prasarana, Kelembagaan)	41,10	Pengukuran Indeks Oleh Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	Bidang Transmigrasi
3.	Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan	2.30%	Perhitungan oleh BPS	Bidang Perdagangan
	Laju Pertumbuhan sektor Industri	1.00%	Perhitungan oleh BPS	Bidang Perindustrian

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja pemerintahan yang fokus pelaporannya adalah keberhasilan atau ketidakberhasilan unit organisasi dalam proses perwujudan visi dan misinya, sehingga pelaporan LKjIP berisi pula tentang indikator kinerja, target kinerja dari setiap indikator kinerja, hasil pengukuran realisasi atas target kinerja pada tahun berkenaan, dan analisis atas progres realisasi kinerja terhadap pencapaian tujuan.

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis.

Pengukuran kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari Data internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keuangan daerah maupun laporan kegiatan tahunan lainnya; Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan program dalam mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat diukur dan diketahui tingkat

kemajuan pencapaian realisasi kinerja. Lebih lanjut hasil evaluasi merupakan bahan yang penting untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan. sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

Tabel 3.1

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	< 53%	Kurang Baik

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja 3 (Tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021

NO	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Misi I : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan					
Tujuan : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik					
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	1.1 Hasil penilaian AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi oleh Inspektorat	A 88,31%	A 88,39%	100,09%

MISI II : Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat						
Tujuan : Meningkatnya ekonomi masyarakat di Kawasan Transmigrasi						
2.	Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi	2.1	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	41,10	41,10	100%
MISI III : Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah						
Tujuan : Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan						
3.	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian dan Perdagangan	3.1	Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan (ADHK)	2.30 %	(0,39%)*	(74,6%)
		3.1.	Laju Pertumbuhan sektor Industri (ADHK)	1.0%	(3,08%)*	(256,4%)

3.3 Capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Pandemi covid-19 masih sangat berdampak besar terhadap perekonomian daerah di tahun 2021, Hal ini terlihat pada capaian sektor perekonomian yang rendah pada tahun 2021. Pandemi ini juga mengakibatkan sebagian besar anggaran yang ada di OPD *direfocusing* untuk penanganan covid-19 sehingga target kinerja yang awalnya telah disusun harus disesuaikan dengan kondisi keuangan OPD.

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Hasil penilaian AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi oleh Inspektorat		A 88,31 %	A 88,39%	100,09%

Sasaran Meningkatkannya akuntabilitas kinerja dinas diukur dengan indikator yang diperjanjikan yaitu Hasil penilaian AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi oleh Inspektorat dengan komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan kinerja. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dipertanggungjawabkan secara periodik. Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja hasil evaluasi OPD Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2020 dan 2021 adalah 88,31 dan 88,39* dengan kategori A. Rincian penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 3.3.1 di bawah ini :

Tabel 3.4
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

NO	Komposisi Yang Dinilai	Nilai		
		Bobot	2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	29,10	29,40
b.	Pengukuran Kinerja	25	20,10	19,79
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,48	14,33
d.	Evaluasi Internal	10	8,30	0,09
e.	Capaian Kinerja	20	17,33	15,79
	Nilai Hasil Evaluasi	100	88,31	88,39
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Tingkat akuntabilitas kinerja yang diraih oleh Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan surat dari Inspektorat Nomor : 713/893/LHE-LKj/Insp-PS/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 perihal Laporan Dari Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Tahun 2021, Terdapat beberapa hal yang masih memerlukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, adalah sebagai berikut:

1. Agar lebih menyempurnakan rencana kinerja antara lain penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja, sasaran perencanaan kinerja Tahunan tetap berorientasi hasil, dokumen perjanjian kinerja tetap selaras dengan Renstra , rencana aksi atas kinerja tetap ada, rencana kinerja Tahunan tetap dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran, target kinerja yang diperjanjikan dipergunakan untuk mengukur keberhasilan dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan, rencana aksi atas kinerja tetap dimonitor pencapaiannya secara berkala.
2. Agar lebih menyempurnakan pengukuran kinerja antara lain indikator kinerja utama sebagai ukuran kinerja tetap diformalkan dan tetap dipublikasikan tiap tahun, data kinerja yang diperoleh tepat waktu, data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal, indikator kinerja utama tetap direviu secara berkala dengan menunjukkan hasil yang lebih baik (ada inovatif).
3. Agar lebih menyempurnakan pelaporan kinerja antara lain laporan kinerja tetap disusun dan disampaikan tepat waktu, laporan kinerja tetap diupload kedalam website dan menyajikan informasi mengenai pencapaian indikator kinerja utama, informasi kinerja tetap digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, informasi yang disajikan dipergunakan sepenuhnya untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dan dipergunakan untuk penilaian kinerja.
4. Agar lebih menyempurnakan evaluasi internal antara lain pedoman/SOP selalu ada guna evaluasi kinerja internal organisasi, tetap ada pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan , untuk perbaikan manajemen kinerja dan untuk mengukur keberhasilan unit kerja.
5. Agar lebih menyempurnakan capaian kinerja antara lain target dapat dicapai, dengan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya, informasi mengenai kinerja tetap

dapat diandalkan, terus melakukan inovasi dalam manajemen kinerja dan agar ditahun berikutnya Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh penghargaan tingkat nasional.

Tabel 3.5

Realisasi Kualifikasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja	satuan	Realisasi	
			2020	2021
1	Hasil penilaian AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi oleh Inspektorat	Skala	A	A

Tabel 3.6

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi SAKIP OPD

NO	Indikator Kinerja	satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Hasil penilaian AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi oleh Inspektorat	Skala	A (88,31%)	A (88,39%)	100,09 %*

Dari tabel di atas dapat dijelaskan target indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 adalah A (88,31%) dan terealisasi A (88,39%) dengan capaian indikator kinerja adalah 100.09% berdasarkan klasifikasi penilaian, indikator kinerja ini tergolong berhasil dengan predikat memuaskan.

Dalam peningkatan nilai SAKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, masih ditemukan hambatan antara lain :

1. Waktu penyusunan Dokumen perencanaan kinerja (Renstra) yang sangat terbatas, mengingat, adanya perubahan nomenklatur OPD pada akhir tahun 2021.
2. Prosedur penganggaran Perangkat Daerah belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan

3. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan target-target yang ingin dicapai
4. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome

Sasaran 2: Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 2
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi		41,10	41,10	100 %

Dari Tabel 3.7 di atas, dapat disimpulkan bahwa Sasaran IV Meningkatnya Kawasan Transmigrasi Kemandirian Transmigran dengan Indikator kinerja Indeks kemandirian Kawasan Transmigrasi dari target 41,10 telah terealisasi 41,10 dengan capaian 100%. Rendahnya target ini telah diprediksi dari awal tahun, karena dampak pandemic Covid-19 yang terus berlanjut dan bahkan memperlambat laju perekonomian masyarakat khususnya masyarakat miskin di kawasan transmigrasi. Nilai indeks 41,10% dengan status berkembang, dipenuhi dengan realisasi 41,1 % indeks kawasan pada tahun 2021, dengan rincian hasil penilaian Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terhadap Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut sebagai berikut :

Tabel 3.8
Hasil Evaluasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut
Tahun 2021

No	Kawasan	Kabupaten	Dimensi	Pengukuran			
				Indeks Dimensi	Indeks Komposit	IPKTrans	Status
1.	Lunang Silaut	Pesisir Selatan	Ekonomi	35,25	13,82	41,10	Berkembang
			Sosial Budaya	10,82	1,41		
			Lingkungan	34,99	2,7		
			Jejaring Prasarana	65,69	18,58		
			Kelembagaan	38,96	4,58		

Sumber : Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Indeks Kemandirian Kawasan transmigrasi 41,1 ditentukan dari tingkat sarana dan prasarana yang telah dibangun/tersedia , keterlibatan dan kepedulian stakeholder/pemangku kepentingan dalam peningkatan dan pengembangan kawasan transmigrasi, penguatan kelembagaan yang ada, tingkat kreativitas dan inovasi warga trans, kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan secara mandiri sehingga mampu memiliki komoditi unggulan tersendiri dan lain-lainnya yang tidak terlepas dari peran serta Pemerintah baik pusat, provinsi maupun Kabupaten Pesisir Selatan.

Pengukuran status kawasan dilakukan berdasarkan karakteristik wilayah yang diwakili dalam dimensi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jaringan prasarana dan sarana dan kelembagaan yang membentuk indeks komposit sehingga diperoleh indeks perkembangan transmigrasi di kawasan transmigrasi Lunang Silaut Kab. Pesisir Selatan sebesar 41,1 (berkembang) , artinya dari semua indikator dimensi masih berfungsi dan masih perlu perhatian yang lebih dalam pengembangan dalam pemenuhannya di masa mendatang sehingga tercipta kota mandiri di kawasan transmigrasi dan masyarakat yang berada dalam kawasan tersebut sudah dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri.

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk Indikator Indeks kemandirian transmigran dengan capaian 100%, didukung dengan capaian realisasi Program dan Kegiatan melalui kegiatan dengan capaian fisik 100% dan keuangan 91,93%.

Penentuan target indeks adalah tahapan pelaksanaan pembangunan pada kawasan dan warga transmigrasi, baik dari tahap perencanaan, pembangunan dan pengembangan sehingga pada akhirnya akan menjadi kota atau desa baru yang mandiri. Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada Tahun 2021 bahwa capaian kinerja untuk indikator ini tidak ditargetkan terlalu tinggi, karena pandemi covid-19 sangat mempengaruhi kemandirian kawasan transmigrasi, namun dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi dan pemulihan ekonomi masyarakat transmigran, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan memanfaatkan Dana Alokasi Khusus bidang Transmigrasi APBN Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2021 untuk melakukan kegiatan, yaitu :

1. Pembangunan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Desa Strategis Simpang Polsek Silaut - Sungai Pulau

Hasil pembangunan dan peningkatan jalan desa Strategis Simpang Polsek Silaut - Sungai Pulau tahun 2021 sebagai berikut :



Gambar 3.1 jalan desa Strategis Simpang Polsek Silaut - Sungai Pulau

Membandingkan Realisasi Capaian Kinerja dengan target Jangka Menengah

Capaian Realisasi Kinerja Sasaran 2 Meningkatnya Kemandirian Kawasan Transmigrasi pada tahun 2021 juga merupakan bagian dari target Renstra Dinas tahun 2021 sd 2026 dalam mendukung capaian RPJMD dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja dan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Target Akhir Renstra 2021	Capaian s/d 2021 terhadap RPJMD 2021
1	Meningkatnya Kemandirian Kawasan Transmigrasi	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	41,1	41,1	100%

Dari Tabel 3.8 di atas, dapat dilihat bahwa Target Kinerja Sasaran IV Meningkatnya Kemandirian Transmigrasi sudah mencapai 100% dari target yang ditetapkan sampai dengan akhir RPJMD 2021 dan Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

Sasaran 3: Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian dan Perdagangan

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 3
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian 2021 (%)
			2021	2021	
1	Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan (ADHK)	%	2.30	(0,39)*	(74,6)
2	Laju Pertumbuhan sektor Industri (ADHK)	%	1.0	(3,08)*	(256,4)

Indikator 1. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Tabel 3.11
Indikator kinerja sasaran strategis 3 sektor Perdagangan
Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan (ADHK)	%	2.30	(0,39)*	(74,6)

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa pada Tahun 2021 terjadi perlambatan laju pertumbuhan sektor perdagangan dengan capaian kinerja sebesar (74,6%). Dampak pandemi covid-19 pada sektor perekonomian sangat begitu besar, terutama pada sektor perdagangan yang pada tahun 2021 yang merupakan sektor pemberi kontribusi kedua terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu 12,25% terhadap total PDRB Kabupaten Pesisir Selatan. Perlambatan laju ini sangat signifikan dibanding tahun lalu, dimana pada tahun 2020, masih terjadi kenaikan laju pertumbuhan sektor perdagangan sebesar 8,37% dan saat ini melambat sebesar (0,39%).

Perhitungan laju pertumbuhan sektor perdagangan ini tentunya sangat didukung oleh aktifitas ekonomi masyarakat yang sangat menurun dan tidak bergairah saat pandemic covid-19. Pemenuhan kebutuhan hanya dilakukan untuk kebutuhan prioritas terutamanya kebutuhan pokok dan barang penting. Dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan memanfaatkan telah menyusun beberapa program dan kegiatan bidang perdagangan dari APBD kabupaten Tahun Anggaran 2021, untuk kegiatan :

1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Pasar Kabupaten/Kota

Kegiatan ini, dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar. Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%) dihitung dengan menggunakan perhitungan koefisien variasi harga bahan pokok tahun 2021, sebagaimana pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.12

KOEFISIEN VARIASI HARGA ANTAR WAKTU BARANG POKOK DAN PENTING KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2021

No	Komoditi	Tahun 2021												Standar Deviasi	Rata2 2021	KV 2021
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des			
1	Beras	13,500	13,250	14,000	13,300	14,000	13,500	13,000	13,500	13,500	13,300	13,500	13,500	285	13,488	2.110
2	Gula	13,500	13,500	13,500	14,000	14,000	13,600	14,000	14,000	13,500	13,500	13,500	13,250	268	13,654	1.959
3	Minyak Goreng	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	15,000	15,000	16,000	16,500	16,500	19,000	20,000	2,049	15,667	13.076
4	Tepung Terigu	9,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	144	9,958	1.449
5	Cabe	40,000	40,000	43,500	44,000	25,000	30,000	28,000	24,000	26,000	42,000	52,000	42,000	9,262	36,375	25.462
6	Bawang Merah	26,800	26,000	28,000	28,000	28,000	24,000	24,000	35,000	26,000	24,000	22,000	28,000	3,311	26,650	12.423
7	Bawang Putih	26,800	26,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	26,000	26,000	911	27,400	3.323
8	Daging Ayam	33,000	32,500	32,500	35,000	35,000	32,500	32,500	30,000	30,000	30,000	30,000	32,500	1,811	32,125	5.636
9	Telur Ayam	26,000	27,200	27,200	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	1,300	24,700	5.265
10	Daging Sapi	125,000	120,000	120,000	120,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000	4,502	127,083	3.542
11	Kacang Kedelai	13,500	13,000	13,000	14,000	14,000	14,000	14,000	15,000	15,000	15,000	13,000	15,000	811	14,042	5.773
12	Garam	9,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	213	10,000	2.132
13	Ikan Asin Teri	100,000	100,000	110,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	110,000	100,000	100,000	100,000	3,892	101,667	3.829
14	Ikan Segar	41,000	40,000	42,000	40,000	40,000	40,000	42,000	40,000	41,000	42,000	45,000	42,000	1,485	41,250	3.599
15	Susu Bubuk	44,500	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	44,000	144	44,042	0.328
16	Kacang Tanah	25,500	25,000	25,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	838	26,542	3.158
17	Kacang Hijau	25,000	24,000	24,000	27,000	27,000	27,000	27,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	1,168	25,500	4.579
18	Mie Instan	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,500	3,000	3,000	3,000	144	3,042	4.745
19	Ketela Pohon	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	-	5,000	-
20	Tempe	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	19,000	19,000	19,000	19,000	18,000	18,000	492	18,333	2.686
KOEFISIEN VARIASI HARGA RATA-RATA																5.254

Dari tabel diatas tergambar bahwa selama tahun 2021 kondisi harga bahan kebutuhan pokok rata rata berada dibawah 9% artinya harga masih dalam keadaan stabil.

Tabel 3.13
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi
1	Koefisien Variasi Harga Bahan Kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya antar waktu Pasar	%	<9%	5,254%

Tabel diatas menggambarkan bahwa upaya pemerintah menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok saat pandemi covid-19 sudah cukup baik, dengan realisasi melebihi target yang ditetapkan. Ini artinya tidak terjadi gejolak harga yang tinggi selama tahun 2021, walaupun di bulan bulan tertentu terjadi kenaikan harga bahan kebutuhan pokok tetapi masih dibawah garis batas stabilitas harga yaitu <9%. Dalam rangka menjaga stabilitas harga di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dengan keterbatasan anggaran yang ada hanya bisa melakukan pekerjaan subkegiatan yaitu pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan.

2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dilakukan dengan mengontrol nilai persentase kinerja realisasi pupuk yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Persentase kinerja realisasi pupuk (\%)} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase kinerja realisasi pupuk pada tahun 2021 (\%)} : \frac{14.072}{96.100,24} \times 100\% = 14,64\%$$

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

Yang dimaksud dengan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) adalah rencana kebutuhan bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani dan merupakan alat pesanan pupuk.

Pengawasan pupuk dan pestisida pada tahun 2021 dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan legalitas dokumen perizinan

3. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat

Pembinaan terhadap pengelola pasar dilakukan sebagai upaya pembenahan dan pemeliharaan pasar rakyat yang merupakan pusat perekonomian masyarakat di daerah yang diharapkan akan mampu memfasilitasi dan mendorong bangkit dan stabilnya perekonomian masyarakat kabupaten Pesisir Selatan ditengah kondisi pandemic Covid-19. Sesuai dengan Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi menargetnya 1 (satu) pasar menuju SNI yang mana diharapkan, pasar ini dapat memenuhi beberapa kriteria penetapan pasar SNI yang ditetapkan Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan, menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan berupa Pasar Rakyat harus berpedoman kepada SNI Pasar Rakyat (SNI 8152.2015). Hal ini juga akan berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap pasar-pasar yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya.

SNI Pasar Rakyat merupakan standarisasi baku dalam pengelolaan pasar rakyat. SNI Pasar Rakyat bertujuan untuk menjadi pedoman dalam mengelola, membangun serta memberdayakan komunitas Pasar Rakyat. "Dengan demikian Pasar Rakyat dikelola secara profesional akan menjadi sarana perdagangan yang komprehensif dan kompetitif, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan perlindungan terhadap konsumen serta meningkatkan omset perdagangan,"

Terdapat **3 persyaratan** dalam SNI pasar rakyat yaitu :

1. **Persyaratan umum** terdiri dari lokasi pasar, kebersihan dan kesehatan, serta keamanan dan kenyamanan.

2. **Persyaratan teknis** terdiri dari ruang dagang, aksesibilitas dan zona, pos ukur ulang dan sidang tera, fasilitas umum, elemen bangunan, keselamatan dalam bangunan, pencahayaan, sirkulasi udara, drainase, ketersediaan air bersih, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, sarana telekomunikasi, dan keselamatan dalam bangunan.
3. **Persyaratan pengelolaan** terdiri dari prinsip pengelolaan pasar, tugas pokok dan fungsi pengelola pasar, prosedur kerja pengelola pasar, struktur pengelola pasar, pemberdayaan pedagang, serta pembangunan pasar.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada periode 2016 -2021 berupaya melaksanakan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dengan berpedoman kepada SNI 8152.2015. belum semuanya persyaratan SNI Pasar Rakyat dapat terpenuhi, mengingat keterbatasan anggaran, hanya beberapa kriteria SNI yang dapat terpenuhi sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Sampai tahun 2021 terdapat 4 (Empat) pasar yang telah memenuhi beberapa kriteria SNI yang disyaratkan (telah menuju kriteria SNI) yaitu Pasar Rakyat Painan, Pasar Rakyat Kambang, Pasar Rakyat Batang Kapas dan Pasar Rakyat Tapan.

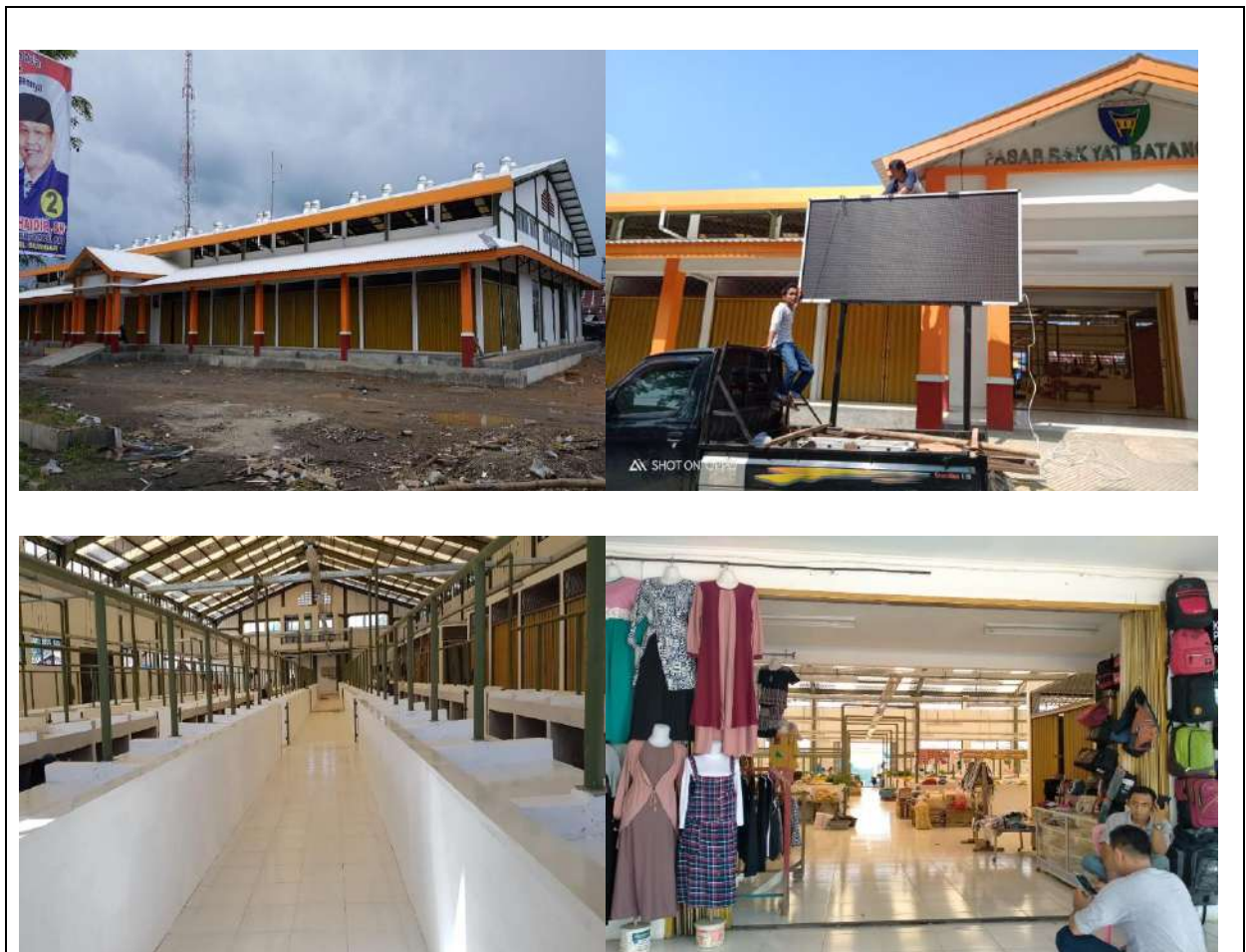




Gambar 3.2 Pasar Rakyat Painan



Gambar 3.3 Pasar Rakyat Kambang



Gambar 3.4 Pasar Rakyat Batang Kapas





Gambar 3.5 Pasar Rakyat Tapan

Berikut data perkembangan urusan perdagangan Dinas Perdagangan dan transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2021 :

Tabel 3.14
Data Pasar di Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2021

No	Uraian	2021
1	Jumlah Pasar rakyat dikelola Pemerintah Kabupaten	11 pasar
2	Jumlah Pasar rakyat dikelola Pemerintah Nagari	30 pasar
3	Jumlah pasar rakyat yang dikelola bersama antara pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari	9 pasar

Sumber : Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, 2021

4. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang, dan Pengawasan

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera,Tera Ulang dilakukan dengan pelayanan kemetrolagian berupa tera, tera ulang atau kalibrasi alat ukur dalam yang digunakan dalam perdagangan. Tera berarti pengujian atas UTP yang belum digunakan. Sementara itu, tera ulang berarti pengujian atas UTP yang sebelumnya pernah ditera. Pada tahun 2021, pelaksanaan tera-tera ulang yang dilakukan meliputi pelayanan tera-tera ulang UTP di kantor dinas UPTD Kemetrolagian. Dengan demikian maka pemerintah menjamin adanya layanan perlindungan bagi konsumen terhadap kepastian ukuran dan standarisai alat ukur, timbang dan takar yang digunakan konsumen.

Indikator 2. Laju Pertumbuhan Sektor Perindustrian

Tabel 3.15
Indikator kinerja sasaran strategis 3 Sektor Perindustrian Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Laju Pertumbuhan sektor Industri (ADHK)	%	1,00	(3,08)*	(256,4)

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada Tahun 2021 terjadi perlambatan laju pertumbuhan sektor perindustrian dengan capaian kinerja sebesar (256,4%). Sama seperti sektor perdagangan, sektor perindustrian yang juga merupakan sektor kunci penggerak perekonomian di kabupaten pesisir selatan menurun dan tidak bergairah pada saat pandemi.

Perlambatan laju pertumbuhan PDRB yang cukup besar pada sektor Industri, disebabkan oleh perputaran nilai pendapatan atau omset yang lambat pada sektor ini, oleh karena itu, banyak diantara para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang beralih ke sektor perdagangan atau pertanian.

Dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi pada saat pandemi, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan beberapa kegiatan prioritas pelayanan masyarakat di bidang Perindustrian dan kegiatan pendataan yang diharapkan akan memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai kondisi pelaku IKM di daerah pada saat pandemi. Disamping itu, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik APBN Kementerian Perindustrian, pemerintah melakukan pembangunan sentra IKM perikanan tahap III. Pembangunan sentra IKM tahun 2021 ini merupakan finalisasi pembangunan Sentra IKM yang telah berlangsung sejak tahun 2018, dan diharapkan akan dapat beroperasi pada tahun berikutnya.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dalam rangka peningkatan laju pertumbuhan PDRB pada tahun 2021, antara lain :

1. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat dalam rangka fasilitasi sertifikat halal IKM, legalisasi produk (merek HKI) dan izin edar BPOM
2. Melakukan koordinasi melalui penyuluhan ke IKM minyak atsiri di Lunang

3. Verifikasi teknis penerbitan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah (IUI-K dan IUI-M)
4. Keikutsertaan dalam rapat koordinasi penumbuhan IKM kerajinan se Sumatera Barat melalui Dekranasda
5. Pembangunan Sentra IKM Perikanan Tahap III
6. Pendataan IKM sebagai data dasar Sistem Informasi Industri Nasional (SiINas)

Berikut data dukung urusan industri Tahun 2021 :

I. Rekapitulasi Data Industri Kecil Menengah (IKM) Tahun 2021

Tabel 3.16
Tabel Pertumbuhan Industri tahun 2016 – 2021 (%)

NO	URAIAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertumbuhan IndustriKecil (%)	6,08	10,12	8,94	1,20	35.47

Sumber : Direktori IKM DP-Trans Pessel, 2021

Kualitas pendataan yang baik akan menentukan kualitas informasi Industri yang disampaikan, hal ini sebagaimana tercantum sebagai Indikator sasaran output pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

Pada tahun 2021, perubahan metode pendataan, dimana melibatkan nagari sebagai pengampu utama, pendataan di wilayah kerjanya menyebabkan data yang diperoleh lebih komprehensif, akurat dan terkini. Dengan demikian peningkatan angka pertumbuhan Industri Kecil yang sangat signifikan pada tahun 2021, diharapkan akan mampu memberikan dampak positif dalam pemerataan pembinaan dan fasilitasi IKM kedepannya.

A. Rekapitulasi Data IKM tahun 2020-2021

Tabel 3.17
Rekapitulasi Data Industri Kecil dan Menengah

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH INDUSTRI KECIL MENENGAH DAN INDUSTRI BESAR	
		TAHUN 2020	TAHUN 2021
1.	INDUSTRI KECIL MENENGAH (Unit Usaha)	2.503	3.879
	a. Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	9.796	11.878
	b. Nilai Investasi (Rp.)	100.412.401.000	127.583.320.000



c. Nilai Produksi (Rp.)	433.303.325.000	441.090.628.700
d. Nilai Bahan Baku (Rp.)	216.526.551.000	236.799.132.400
e. Omset (Rp.)	498.905.842.550	532.850.652.400

B. Jumlah Industri berdasarkan Klasifikasi Industri

Tabel 3.18
Rekapitulasi Data Industri Berdasarkan Klasifikasi Industri

NO	KLASIFIKASI INDUSTRI	JUMLAH IKM	TENAGA KERJA	INVESTASI	NILAI PRODUKSI
1	INDUSTRI MAKANAN	1.551	4.242	32.811.654.000	169.840.360.800
2	INDUSTRI MINUMAN	140	371	9.740.850.000	8.918.310.000
3	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU	-	-	-	-
4	INDUSTRI TEKSTIL	134	852	3.319.374.000	9.273.102.000
5	INDUSTRI PAKAIAN JADI	277	673	4.695.676.000	11.429.406.000
6	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI	11	25	379.635.000	954.310.000
7	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA	112	272	1.232.682.000	3.016.730.000
8	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS	-	-	-	-
9	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN	17	61	2.235.022.000	1.514.630.000
10	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI	-	-	-	-
11	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA	560	2.195	25.408.180.000	59.496.742.000
12	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL	4	15	35.000.000	101.160.000
13	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK	3	7	114.500.000	204.000.000
14	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM	322	802	6.037.997.000	21.917.685.000
15	INDUSTRI LOGAM DASAR	-	-	-	-
16	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATANNYA	137	375	7.262.734.000	20.299.070.900

17	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK	-	-	-	-
18	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK	-	-	-	-
19	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL	4	8	218.800.000	855.000.000
20	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER	17	82	1.767.950.000	4.653.800.000
21	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA	21	56	1.576.100.000	1.617.000.000
22	INDUSTRI FURNITUR	489	1.606	28.535.206.000	107.198.402.000
23	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA	80	236	2.211.960.000	9.800.920.000
24	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN	-	-	-	-
	JUMLAH	3.879	11.878	127.583.320.000	431.090.628.700

Sumber : Direktori IKM DP-Trans Pessel, 2021

II. Data Sertifikasi dan Standarisasi Produk IKM serta Legalisasi Izin Usaha Industri

Dikarenakan refocusing anggaran tahun 2021, beberapa kegiatan fasilitasi sertifikasi, standarisasi dan legalisasi IKM yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan.

Kemudian untuk tahun 2021, Pemerintah Daerah berhasil menerbitkan 14 merek IKM yang sudah terlegalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkumham RI, yang mana IKM-IKM ini merupakan usulan fasilitasi merek (HKI) tahun 2019.

Berikut rekapitulasi data Sertifikasi, Standarisasi dan Legalisasi IKM dan Produk IKM :

Tabel 3.19
Rekapitulasi Jumlah IKM yang difasilitasi
Sertifikasi, Standarisasi Produk IKM
dan Izin Usaha Industri Tahun 2020-2021

No	Jenis Izin	Izin yang difasilitasi tahun -	
		2020	2021
1	LEGALITAS USAHA		
	IUI-K (IKM)	6	6
2	LEGALITAS PRODUK		
	MD		1
	Halal	5	8
	Merek	0	4

	SNI (Sukarela)	0	0
	Barcode	0	0
	Total Legalitas Produk	5	13

Tabel 3.20
Rekapitulasi Sertifikasi, Standarisasi Produk IKM
dan Izin Usaha Industri yang Terbit Tahun 2020-2021

No	Jenis Izin	Jumlah Izin yang diterbitkan tahun -	
		2020	2021
1	LEGALITAS USAHA		
	IUI-K (IKM)	7	4
2	LEGALITAS PRODUK		
	Izin Edar (P-IRT)	21	
	MD		1
	Halal	4	8
	Merek	12	16
	SNI (Sukarela)	0	0
	Barcode	0	0
	Total Legalitas Produk	44	29
	Total Legalitas yang difasilitasi Dinas (Tanpa PIRT)	23	29

Pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga mendapatkan fasilitasi pelatihan teknis, fasilitasi sertifikasi halal dan merek (HKI) dan MD-BPOM dari Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat.

1. Pelatihan Teknis dan Sosialisasi bagi pelaku IKM

Pada tahun 2021 terdapat 86 pelaku IKM yang diikutsertakan dalam pelatihan teknis dan sosialisasi IKM yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat serta Kementerian Perindustrian RI.



Tabel 3.21
Pelatihan IKM tahun 2021

N O	NAMA PESERTA	NAMA IKM	ALAMAT	JENIS PELATIHAN	TEMPAT	TAHUN	INSTANSI YANG MELAKSANAKAN
1	DESSY NOVITA SARI	ANANDA FROZEN	KEC. IV JURAI	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2	MEGA YULIANA	RENDANG EGA	KEC. IV JURAI	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
3	ELVI SUKRAINI	ARAI PINANG BUNDA	KEC. IV JURAI	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
4	YUDARNIS	BUNDA YUL	KEC. IV JURAI	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
5	SISRA HAYATUL MAYA	CAHAYA BARU	KEC. IV JURAI	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
6	NIZRIDA HILDA	PERMATA BUNDA	KEC. IV JURAI	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



7	SILVI OKTAVIA	SINI PLAN	KEC. IV JURAI	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
8	YULHANIS	UPPKS BERKAH	KEC. IV JURAI	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
9	ERNA SYAFRINA	UPPKS BERKAH	KEC. IV JURAI	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
10	ANDRE	SATRIA BARU	KEC. IV JURAI	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
11	RIZA INDIANI	ANDRIZA FROZEN	KEC. BATANG KAPAS	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
12	EFNIDA	KERUPUK UBI FAIRA	KEC. BATANG KAPAS	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
13	YUSMA EDRIANI	RUMAH UBI "OERANG KARAN"	KEC. BATANG KAPAS	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



14	MARTINIS	KATO SAIYO	KEC. RANAH PESISIR	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
15	YULI MARNI	KATO SAIYO	KEC. RANAH PESISIR	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
16	FIFI SEKARWATI	KATO SAIYO	KEC. RANAH PESISIR	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
17	ZAHRA AYU RAHMADA NI	KATO SAIYO	KEC. RANAH PESISIR	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
18	LINDA HIDAYAH	OLAN-OLAN UBI LINDA	KEC. RANAH PESISIR	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
19	EMA MALINI	KERUPUK UBI EMA	KEC. RANAH PESISIR	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
20	LINDA	LIMPIANG UBI LINDA	KEC. RANAH PESISIR	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



21	ELVI KAISIH	KUE TALAM ELVI	KEC. RANAH PESISIR	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
22	IDA HERLINDA	KERIPIK UBI IDA	KEC. RANAH PESISIR	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
23	ERLINDA WATI	KERUPUK UBI WATI	KEC. LENGAYAN G	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
24	GUSMAYARNI	KERUPUK UBI YARNI	KEC. LENGAYAN G	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
25	DARNI WATI	KERUPUK UBI DARNI	KEC. LENGAYAN G	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
26	YUSNA DEPI	KERUPUK UBI IYUS	KEC. LENGAYAN G	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
27	ELI ROSNIDA	KERUPUK UBI ELI	KEC. LENGAYAN G	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



28	MIRA AFRIANTI	KERUPUK UBI MIRA	KEC. LENGAYAN G	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
29	IKAL LIANI	KERUPUK UBI LIANI	KEC. LENGAYAN G	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
30	ETRIWATI	KERUPUK UBI WATI	KEC. LENGAYAN G	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
31	YUHELMI	KERUPUK UBI SIHEL	KEC. LENGAYAN G	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
32	ERMAWATI	KERUPUK UBI EMA	KEC. LENGAYAN G	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
33	NURMILIS	KERUPUK UBI INUR	KEC. LENGAYAN G	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
34	KASMADEVI	KERUPUK UBI IKAS	KEC. LENGAYAN G	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



35	TAUFIQ HIDAYAT	KERUPUK UBI TAUFIQ	KEC. LENGAYAN G	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
36	SIPRATMA NACANDRA	KERUPUK UBI CANDRA	KEC. LENGAYAN G	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
37	IDAN	KERUPUK UBI IDAN	KEC. LENGAYAN G	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
38	ERNI DEWITA	PONDOK ASYURA	KEC. LENGAYAN G	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
39	RAFI	RAFI SANJAI	KEC. BAYANG	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
40	NURHASNA H	AMANAH JAYA	PANCUNG SOAL	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
41	PEN HENDRIAN AS	LENGAYAN G TEKNIK	KEC. LENGAYAN G	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



42	ELSYOFRIA DI	ELSYOF TEKNIK	KEC. KOTO XI TARUSAN	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
43	DEDI ADRIANTO	FAREL TEKNIK	KEC. IV JURAI	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
44	ILMAN	FAMILY TEKNIK	KEC. IV JURAI	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
45	DEDI NOFRIALDI	UD. WIWIN TEKNIK	KEC. IV JURAI	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
46	NOFRIZAL	KARYA SAHABAT	KEC. IV JURAI	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
47	SYAIFRNO	CV. ANAK SALIDO	KEC. IV JURAI	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
48	RAHMAD HIDAYAT	GHIFAR TEKNIK	KEC. IV JURAI	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



49	M. HABIB. H	AM. TEKNIK	KEC. BAYANG	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
50	DINOL	BENGKEL DAMRI	KEC. BAYANG	KEGIATAN SOSIALISASI PROTOTIPE TEKNOLOGI TEPAT GUNA	HANNAH HOTEL SYARIAH PAINAN DAN KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
51	MEKROZA	PASISIA SANTIANG	KAMPUNG LUBUK BAY NAGARI TANJUNG DURIAN KEC. BAYANG	PELATIHAN KERAJINAN LIMBAH PERALON	HOTEL PADANG, JALAN BAGINDO AZIZ CHAN NO. 28 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
52	NURSAL	KATIDIANG SEPATU	JL. PASAR BARU-ASAM KUMBANG NAGARI TALAOK, KEC. BAYANG	PELATIHAN DIVERSIFIKASI PRODUK DARI KULIT	HOTEL RANGKAYO BASA JL. SUTAN SYAHRIR NO. 144 SILAING BAWAH	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
53	MORI YULITA PUTRI	DENDENG DAUN SINGKONG MORI	KAMPUNG TAMBANG, KELURAHAN TAMBANG KEC. IV JURAI	MENGHADIRI SOSIALISASI PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL	AULA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
54	JEK KAMISRI	D&J KAMISRI FAMILY	SALIDO KETEK, KELURAHAN SALIDO SARI BULAN KEC. IV JURAI	MENGHADIRI SOSIALISASI PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL	AULA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
55	RIDHOTON	FARIDA JAMUR CRISPY	GERBANG KTM, KELURAHAN DURIAN SERIBU, KEC. SILAUT	MENGHADIRI SOSIALISASI PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL	AULA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



56	APRIS	KOPI BUBUK PANSO	KOTO BARU, KAMPUNG BEROK KELURAHAN INDERAPURA, KEC. PANCUMH SOAL	MENGHADIRI SOSIALISASI PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL	AULA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
57	ULTRA FADLI	BUBUK KOPI ASLI PAK HAJI	JL. DIPONEGORO NAGARI PAINAN SELATAN, KEC IV JURAI	MENGHADIRI SOSIALISASI PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL	AULA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
58	SECTIOLY SANDRA	THE DAUN GAMBIR MALALA	JL. DIPONEGORO NAGARI PAINAN SELATAN, KEC IV JURAI	MENGHADIRI SOSIALISASI PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL	AULA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
59	SRI NINGSIH	NR SNACK	KAMPUNG LUBUK LUNTA, KELURAHAN LUBUK LUNTA, KEC. SILAUT	MENGHADIRI SOSIALISASI PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL	AULA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
60	GHINA SANIA PUTRI	UMNIAH MIRZA	KAMPUNG BARU NAGARI KOTO VIII PELANGAI KEC. RANAH PESISIR SELATAN	MENGHADIRI SOSIALISASI PENDAFTARAN SERTIFIKAT HALAL	AULA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
61	KADIR	KELOMPOK TANI TALANG JAYA	RANTAU KATAKA NAGARI LUNANG, KEC. LUNANG	PELATIHAN TEKNIS PENINGKATAN MUTU MINYAK ATSIRI	HOTEL IMELDA, KOTA PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



62	NURMAN	KELOMPOK TANI TUNAS MUDA	SUNGAI KUYUNG NAGARI INDERAPURA SELATAN KEC. PANCUNG SOAL	PELATIHAN TEKNIS PENINGKATAN MUTU MINYAK ATSIRI	HOTEL IMELDA, KOTA PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
63	RAIBAS	USAHA MINYAK PALA RAIBAS	SUNGAI TUNU KEC. RANAH PESISIR	PELATIHAN DIVERSIFIKASI PRODUK HASIL PENYULINGAN MINYAK ATSIRI	UPTD DINAS PERINDAG PROVINSI SUMATERA BARAT, KOMPLEK LIK ULU GADUT, PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
64	PEN HENDRIAN AS	LENGAYANG TEKNIK	JL. PASAR MISKIN KAMBANG BARAT KEC. LENGAYANG	PELATIHAN REKAYASA PERALATAN DAN PERKAKAS BANTU MESIN PENGOLAHAN ROTAN	UPTD LOGAM DINAS PERINDAG PROVINSI SUMATERA BARAT, KOMPLEK LIK ULU GADUT, PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
65	MEKROZA	PASISIA SANTIANG	KAMPUNG LUBUK BAY NAGARI TANJUNG DURIAN KEC. BAYANG	PELATIHAN KERAJINAN LIMBAH PARALON	BLK PADANG JL. SUNGAI BALANG BANDAR BUAT KEC. LUBUK KILANG PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
66	PUTRI RAHMAH, S.Kom	KASIH BUNDA	RIMBO PANJANG NAGARI AIR HAJI KEC. LINGGO SARI BAGANTI	PELATIHAN RAJUT ATAU RENDA	PRIMEIR BASKO HOTEL JLN. PROF DR. HAMKA NO. 2 A PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
67	RISKI ARIF FARMANSYAH	MAHLIGAI CITRA KELAPA	KOTO MERAPAK NAGARI SUNGAI TUNU BARAT KEC. RANAH PESISIR	BIMTEK TEKNIS PENGOLAHAN LIMBAH KELAPA	HOTEL NAN TONGGA JL. TUGU PERJUANGAN 45, PASIR, PARIAMAN TENGAH, KOTA PARIAMAN	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



68	GHINA SANIA PUTRI	UMNIAH MIRZA	JL. SIMPANG RAYA PALE, KOTO VIII PELANGAI, KEC. RANAH PESISIR	PELATIHAN DIVERSIFIKASI PRODUK OLAHAN MAKANAN RINGAN ANGKATAN 1	KAWANA HOTEL, JLN THAMRIN NO. 71 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
69	DESY NOVITASARI	ANANDA FROZEN	BUNGO PASANG SALIDO, KEC. IV JURAI	PELATIHAN DIVERSIFIKASI PRODUK OLAHAN MAKANAN RINGAN ANGKATAN 1	KAWANA HOTEL, JLN THAMRIN NO. 71 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
70	MELTA DESYKA	MALALA DAUN GAMBIR	JL. DIPONEGORO NAGARI PAINAN SELATAN, KEC IV JURAI	BIMBINGAN TEKNIS DIVERSITIFIKASI PENGOLAHAN PRODUK GAMBIR	HOTEL PADANG, JALAN BAGINDO AZIZ CHAN NO. 2 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
71	H. JAMIRUS	THE HERBAL SARI GAMBIR	BARUNG-BARUNG BELANTAI UTARA KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	BIMBINGAN TEKNIS DIVERSITIFIKASI PENGOLAHAN PRODUK GAMBIR	HOTEL PADANG, JALAN BAGINDO AZIZ CHAN NO. 2 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
72	RANDI AFRIKA JOHANDRA	USAHA GAMBIR RANDI	TABEK NAGARI RAWANG GUNUNG MALELO KECAMATAN SUTERA	BIMBINGAN TEKNIS DIVERSITIFIKASI PENGOLAHAN PRODUK GAMBIR	HOTEL PADANG, JALAN BAGINDO AZIZ CHAN NO. 2 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
73	MUSLIM TAWAKAL S	USAHA GAMBIR MUSLIM	RAWANG GUNUNG MALELO	BIMBINGAN TEKNIS DIVERSITIFIKASI PENGOLAHAN PRODUK GAMBIR	HOTEL PADANG, JALAN BAGINDO AZIZ CHAN NO. 2 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



74	ALI AMRAN	USAHA GAMBIR ALI AMRAN	KAYU GADANG NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA KECAMATAN SUTERA	BIMBINGAN TEKNIS DIVERSITIFIKASI PENGOLAHAN PRODUK GAMBIR	HOTEL PADANG, JALAN BAGINDO AZIZ CHAN NO. 2 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
75	SYOFYAN	USAHA GAMBIR SYOFYAN	KAYU GADANG NAGARI KOTO NAN TIGO UTARA KECAMATAN SUTERA	BIMBINGAN TEKNIS DIVERSITIFIKASI PENGOLAHAN PRODUK GAMBIR	HOTEL PADANG, JALAN BAGINDO AZIZ CHAN NO. 2 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
76	NOVIA HERTINI	BATIK LOEMPO	KP. PASA NAGARI AMPUAN LUMPO KEC. IV JURAI	BIMBINGAN TEKNIS DIVERSITIFIKASI PENGOLAHAN PRODUK GAMBIR ANGKATAN 2	HOTEL PADANG, JALAN BAGINDO AZIZ CHAN NO. 2 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
77	HENDRA SAPUTRA, M.P	KOMUNITAS EKSPOR PRODUK (KEP) SUMBAR PESSEL	BATANG KAPAS	BIMBINGAN TEKNIS DIVERSITIFIKASI PENGOLAHAN PRODUK GAMBIR ANGKATAN 2	HOTEL PADANG, JALAN BAGINDO AZIZ CHAN NO. 2 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
78	SYAHRIL, S.PD	ASOSIASI PETANI GAMBIR PESISIR SELATAN (APG PESSEL)	BARUNG-BARUNG BELANTAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	BIMBINGAN TEKNIS DIVERSITIFIKASI PENGOLAHAN PRODUK GAMBIR ANGKATAN 2	HOTEL PADANG, JALAN BAGINDO AZIZ CHAN NO. 2 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
79	HENDRICOL	KELOMPOK TANI JAYA	ARO GANTING MUDIK SELATAN KEC. SUTERA	BIMBINGAN TEKNIS DIVERSITIFIKASI PENGOLAHAN PRODUK GAMBIR ANGKATAN 2	HOTEL PADANG, JALAN BAGINDO AZIZ CHAN NO. 2 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



80	EGIP PERNENDES	KELOMPOK TANI JAYA	AMPALU GANTING MUDIK SELATAN KEC. SUTERA	BIMBINGAN TEKNIS DIVERSITIFIKASI PENGOLAHAN PRODUK GAMBIR ANGKATAN 2	HOTEL PADANG, JALAN BAGINDO AZIZ CHAN NO. 2 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
81	TOMI RAHMA DP	KELOMPOK BETA BAHARI MANDIRI	KOTO TARATAK KEC. SUTERA	BIMBINGAN TEKNIS DIVERSITIFIKASI PENGOLAHAN PRODUK GAMBIR ANGKATAN 2	HOTEL PADANG, JALAN BAGINDO AZIZ CHAN NO. 2 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
82	SANGGAR MALOGA	MAHREEN TEKNIK	JL. AMPANG TERAS LUMPO	SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGELASAN BAGI INDUSTRI KECIL MENENGAH LOGAM MESIN	TEMPAT UJI KOMPETENSI LOGAM MESIN (TUK-LM) UPTD LOGAM DINAS PERINDAG PROVINSISUMATERA BARAT, KOMPLEK LIK-ULU GADUT, PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
83	GHINA SANIA FITRI	UMNIAH MIRZA	JL. SIMPANG RAYA PALE, KOTO VIII PELANGAI, KEC. RANAH PESISIR	BIMBINGAN TEKNIS DAN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)	HOTEL DAIMA, JL. SUDIRMAN NO. 17 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
84	WENDRYAN TO, SP		PAINAN	SOSIALISASI PENINGKATAN PENGETAHUAN APARAT TERKAIT DENGAN SERTIFIKASI HALAL	HOTEL PANGERAN CITY, JL. DOBI NO.3 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
85	STELLA ELYSIA DARPIUS, ST		PAINAN	SOSIALISASI PENINGKATAN PENGETAHUAN APARAT TERKAIT DENGAN SERTIFIKASI HALAL	HOTEL PANGERAN CITY, JL. DOBI NO.3 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

86	MRTINIS	KATO SAIYO	PADANG LABAN NAGARI PASIA PALANGAI KEC. RANAH PESISIR	BIMBINGAN TEKNIS DAN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK (CPPOB)	HOTEL DAIMA, JL. SUDIRMAN NO. 17 PADANG	2021	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT
----	---------	---------------	--	--	---	------	--

Berikut Dokumentasi Pelatihan Teknologi Tepat Guna di Hannah Hotel Syariah tahun 2021



Gambar 3.6 Dokumentasi Teknologi Tepat Guna Bagi IKM Logam Tahun 2021

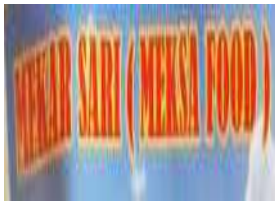
2. Merek Dagang (HKI)

Tahun 2021 terdapat 16 (enam belas) IKM yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual terkait pendaftaran Merek Dagang. Enam belas IKM ini merupakan fasilitasi pendaftaran merek (HKI) dari Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas perdagangan dan perindustrian Provinsi Sumatera Barat tahun 2021

Tabel 3.22
Merk Dagang produk IKM yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Kemenkumham Tahun 2021

N O	NAMA IKM	NAMA PIMPINAN	ALAMAT	JENIS PRODUK	NOMOR PENDAFTARAN	MERKE	INSTANSI YANG MELAKSANAKAN
1	DODOL BUNGA MANDIRI	SAFI' SULAIMAN	KTM SILAUT, NAGARI SUNGAI SARIK KEC. SILAUT KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT	DODOL KETAN	IDM00085 5976		DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KAB. PESISIR SELATAN
2	RAKIK SACY	LINDA WESTARI	JL. SIANIK SAGO, NAGARI SAGO SALIDO, KEC. IV JURAI KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT	RAKIK KACANG, RAKIK MACO	IDM00085 5977		DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KAB. PESISIR SELATAN
3	RENDANG LOKAN DAN PUSAT OLEH-OLEH ISMAWATI	ISMAWATI	SUNGAI AGSO, NAGARI TIGO SUNGAI INDERAPURA, KEC. PANCUNG SOAL KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT	RENDANG LOKAN	IDM00085 5978		DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KAB. PESISIR SELATAN
4	POKHLAS AR KATO SAIYO	MARTINIS	PADANG LABAN, NAGARI PASIA PELANGAI KEC. RANAH PESISIR KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT	RENDANG IKAN	IDM00085 6000		DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KAB. PESISIR SELATAN
5	LINGGO JAPUTEL	LELIS YURNI	JL. BALA RAMBAHAN NAGARI PUNGASAN KEC. LINGGO SARI BAGANTI, KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT	KERUPUK BAWANG	IDM00085 6019		DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KAB. PESISIR SELATAN
6	LARIS JAYA	ZULAIKHATUS SOFIAH	KP. JARWANG III, NAGARI SUNGAI PULAI KEC. SILAUT KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT	JAMU SERBUK JAHE	IDM00085 6020		DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KAB. PESISIR SELATAN

7	JEN'S CRAFT	JENDRIZAL	KOTO RAYA NAGARI LAKITAN SELATAN, KEC. LENGAYANG KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT	ASBAK ROKOK, MINIATUR KAPAL, CEREK	IDM000856021		DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KAB. PESISIR SELATAN
8	BATIK GUNJANTINO	ZURAINI, SY	TARATAK TELENG, NAGARI PULUIK-PULUIK KEC. IV NAGARI BAYANG UTARA KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT	KAIN BATIK	IDM000856033		DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KAB. PESISIR SELATAN
9	SANAF CAKE	HENDRI ERIZON	SEBERANG TAROK NAGARI LAKITAN SELATAN, KEC. LENGAYANG KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT	BOLU MINI, CAKE, BROWNIES	IDM000856034		DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KAB. PESISIR SELATAN
10	MINIATUR KAPAL BERDIKARI / BERDIKARI-MR	M. RIZAL	PASAR GOMPONG, NAGARI KAMBANG BARAT, KEC. LENGAYANG KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT	ASBAK ROKOK, MINIATUR KAPAL, CEREK	IDM000856035		DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KAB. PESISIR SELATAN
11	NAZRA BAKERY	ASMARIYONO	SUNGAI PINANG, NAGARI SUNGAI PINANG TAPAN, KEC. RANAH AMPEK HULU TAPAN KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT	ROTI RASA (COKELAT, KELAPA, PANDAN, MISES)	IDM000856001		DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KAB. PESISIR SELATAN
12	NOPELDA	NORA	JINANG, NAGARI JINANG KAMPUNG. PANSUR, KEC. KOTO XI TARUSAN KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT	TERI KRISPI, KERIPIK PAKIS, SERUNDENG, ARAI PINANG	IDM000856002		DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KAB. PESISIR SELATAN

13	KUWN MEKAR SARI	ISMAWATI	JL. KAWASAN MANDEH, NAGARI AMPANG PULAI KEC. KOTO XI TARUSAN KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT	RENDAN G LOKAN, IKAN, TERI BUMBU, SIPUT TERI	IDM00085 6017		DINAS PERDANGANGAN DAN TRANSMIGRASI KAB. PESISIR SELATAN
14	MUNGKUI H	MARDIAT UN	KOTO NAN AMPEK, NAGARI PELANGAI, KEC. RANAH PESISIR KAB. PESISIR SELATAN, PROVINSI SUMATERA BARAT	SANDAL PRIA DAN WANITA	IDM00085 6018		DINAS PERDANGANGAN DAN TRANSMIGRASI KAB. PESISIR SELATAN
15	BAYANG KREATIF	SUSI PURNAMA SARI	GURUN LAWAS RT 000 RW 000 DESA SAWAH LAWEH PASAR BARU KECAMATAN BAYANG		IDM00090 7188		DISPERINDAG PROVINSI
16	RANAH BUNDO	ALISVA BOTRI	API-API RT 000 RW 000 DESA API-API PASAR BARU KECAMATAN BAYANG		IDM00090 6766		DISPERINDAG PROVINSI

3. Sertifikasi Halal IKM

Pada tahun 2021 ini Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebanyak (delapan) IKM. Berikut IKM yang memperoleh sertifikasi halal produk tahun 2021 :

Tabel 3.23
Sertifikasi Halal produk IKM Tahun 2021

N O	NAMA IKM	NAMA PIMPINA N	ALAMAT	JENIS PRODUK	NO SERTIFIKAT	INSTANSI YANG MELAKSANAKAN
1	Ega Kue Kering	Mega Yuliana	Jl. Bungo pasang 1 No. 35, Rt. 03 Rw. 03, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatn	Makanan Ringan	1311000012 9200921	DISPERINDAG PROVINSI
2	Umniah Marza	Ghina Sania Fitri	Kampung baru, Nagari koto VIII pelangai balai selasa, Kecamatan Ranah pesisir, Kabupaten Pesisir selatan	Makanan Ringan	1311000012 6000921	DISPERINDAG PROVINSI



3	Malala daun gambir	Sectioly Sandra	Jl. Diponegoro, Nagari Painan Selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten pesisir selatan	Minuman dan Bahan Minum	13110000126050921	DISPERINDAG PROVINSI
4	Bubuk kopi asli pak haji	Ultra Fadli	Carocok painan, Nagari painan selatan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten pesisir selatan	Minuman dan Bahan Minum	13110000126070921	DISPERINDAG PROVINSI
5	Kopi Pait Bukit Cubadak	D & J Kamisri Family	Kp. Salido kecil, Nagari salido sari bulan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten pesisir selatan	Minuman dan Bahan Minum	13110000126100921	DISPERINDAG PROVINSI
6	NR Snack	Sri ningsih	Lubuk bunta Silaut kecamatan Silaut	Makanan Ringan	-	DISPERINDAG PROVINSI
7	Tunas Mandiri	Endang Sulestari	Lubuk bunta Silaut kecamatan Silaut	Minuman dan Bahan Minum	-	DISPERINDAG PROVINSI
8	Berkah Sejahtera	Aliasman o	Koto Ranggo, Pukik Kaciak, Lumpo Kec. IV Jurai	Makanan Ringan	-	DISPERINDAG PROVINSI

4. Izin Edar MD-BPOM

Pada tahun 2021 ini Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mendapatkan fasilitasi Izin Edar MD-BPOM dari APBD Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1 (satu) IKM. Berikut IKM yang memperoleh sertifikasi halal produk tahun 2021 :

Tabel 3.24
Izin Edar MD – BPOM yang difasilitasi Tahun 2021

NO	NAMA IKM	PEMILIK	ALAMAT	JENIS PRODUK	KBLI
1.	Umniah Marza	Ghina Sania Fitri	Kampung Baru Nagari Koto VIII Pelanggai Kecamatan Ranah Pesisir	Rendang, Keripik, Aneka Roti dan Kue, Aneka Rajutan	10750 Industri dan Masakan Olahan, 10794 Kelompok Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan sejenisnya, 10710 Industri Produk Roti dan Kue, 13924 Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman

III Data Pembangunan Sentra IKM Perikanan Tahap III

Karena Refocusing APBN pada Tahun 2020, maka dana DAK Kemertian Perindustrian RI Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 220 dilanjutkan pada tahun 2021.

Pada tahun 2021 merupakan pembangunan tahap akhir Sentra IKM Perikanan yang terdiri dari Pembangunan gedung promosi, Pembangunan Infrastuktur Fisik didalam sentra IKM, Pengadaan mesin dan peralatan sentra dan Pendirian Sarana Penunjang Baru. Berikut dokumentasi kegiatan Pembangunan Sentra IKM Perikanan Tahap III :



Gambar 3.7 Pembangunan Sentra IKM tahap III

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 7 (Tujuh) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021, tercantum pada tabel berikut

:

Tabel 3.25
Anggaran dan realisasi anggaran Program/Kegiatan
Yang Menunjang Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Rp 4.591.167.791	Rp 4.451.071.120	96,95 %
2	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Rp 18.059.933.040	Rp. 15.835.998.000	87,69 %
3	Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi	Rp 2.090.591.929	Rp. 1.931.532.564	92,39%
	TOTAL	Rp 24.741.692.760	Rp 22.218.601.684	89,80 %

Dari tabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jumlah Belanja Langsung Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sebesar Rp. 24.741.692.760. Untuk menunjang 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan realisasi sebesar Rp. 22.218.601.684,- atau 89,80 %.
- b. Plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021 untuk menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis setelah perubahan yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021 sebesar Rp. 24.741.692.760,-. Realisi anggaran untuk mendukung perjanjian kinerja tersebut sebesar Rp22.218.601.684. atau 89,80 %.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (Tiga) sasaran yang telah ditetapkan, 2 (dua) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100%, dan 1 (satu) sasaran tidak memenuhi target yang diharapkan sebagai dampak pandemic covid-19 secara langsung pada sektor perekonomian, yaitu "Meningkatnya daya saing sektor perdagangan dan perindustrian"

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditargetkan, sebanyak 2 (enam) indikator kinerja berhasil mencapai nilai 100% ", sedangkan 2 (dua) indikator yaitu laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan laju pertumbuhan sektor perindustrian tidak mencapai target yang diharapkan.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 22,218,601,684, atau 89.8 % dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp 24,741,692,760. Dari 3 (Tiga) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis rata rata sama tinggi.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Kepala Bidang dan Kepala Seksi secara rutin dan berkala dalam rangka evaluasi pelaksanaan program-program dan kegiatan untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan;



2. Melakukan pembinaan dan motivasi kepada pegawai Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai untuk lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat

LAMPIRAN

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021**



Penghargaan Penilaian Kearsipan Perangkat Daerah Tahun 2021